



Volume 3, Nomor 3, September 2023

Faktor Sumber Daya Alam dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian

Survei Teoretis dengan Ilustrasi Kasus Aceh

Mohamad Shohibuddin

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Dian Yanuardy (Dewan Pengurus Sajogyo Inti Utama)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Ahmad Jaetuloh, S.IP (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan badan pelaksana Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta bangunan rumah dan isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 3, Nomor 3, September 2023

© 2023, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Sumber Foto Sampul Depan: Dokumentasi Pribadi Mohamad Shohibuddin.

Saran Pengutipan:

Shohibuddin, Mohamad. “Faktor Sumber Daya Alam dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian: Survei Teoretis dengan Ilustrasi Kasus Aceh.” *Working Paper Sajogyo Institute (Vol. 3, No. 3, September 2023)*. Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.

Tentang Penulis

Mohamad Shohibuddin adalah staf pengajar pada Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama dan pernah menjadi Direktur Eksekutif Sajogyo Institute pada periode 2007-2009.

Beberapa buku yang pernah ditulisnya antara lain adalah: *Fikih Agraria: Sebuah Perbincangan* (2022); *Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan Kebijakan Penanganan* (2020); *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria* (2019); *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, Kajian Empiris* (2018).

Selain itu, ia juga menyunting beberapa buku seperti: *Mewujudkan Demokratisasi Agraria* (2023); *Perjuangan Keadilan Agraria* (2019); *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat* (2019); *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan* (2012); *Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat* (2010).

Karya tulisnya berupa artikel jurnal dan bab buku juga sudah terbit pada berbagai publikasi nasional maupun internasional.

Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=AFoc89IAAAAJ&hl=en>.

Email korespondensi: m-shohib@apps.ipb.ac.id.

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM DINAMIKA KONFLIK DAN PERDAMAIAN: SURVEI TEORETIS DENGAN ILUSTRASI KASUS ACEH

MOHAMAD SHOHIBUDDIN

Abstrak

Dalam studi konflik dan perdamaian, faktor sumber daya alam mendapatkan penekanan tersendiri karena perannya yang bersifat mendua, yakni dapat menjadi baik faktor risiko bagi terjadinya konflik maupun faktor peluang bagi terwujudnya perdamaian. Selain itu, faktor sumber daya alam juga menjadi perhatian tersendiri dalam kaitan dengan kepedulian mewujudkan pembangunan yang bersifat sensitif konflik dan sekaligus menjamin *human security* (keamanan insani).

Menyadari demikian penting peran yang dapat dimainkan oleh faktor sumber daya alam, maka tulisan ini hendak menyajikan survei teoritis singkat mengenai bagaimanakah sebenarnya peran sumber daya alam ini dalam dinamika konflik dan perdamaian. Untuk itu, dalam uraian berikut akan dipaparkan secara padat teori-teori yang secara eksplisit menjelaskan hubungan (*nexus*) antara sumber daya alam dengan kemunculan konflik, proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik berdasarkan kasus-kasus empiris di berbagai negara.

Melalui survei teoritis ini akan dipaparkan tiga pokok bahasan sebagai berikut. Pertama-tama, akan diulas terlebih dahulu beberapa pandangan teoritis mengenai peran yang dapat dimainkan oleh faktor sumber daya alam, baik dalam kondisi kelangkaan maupun kelimpahannya, dalam memicu terjadinya konflik dalam skala besar. Kedua, akan diuraikan beberapa pandangan teoritis mengenai peran penting yang dapat dimainkan oleh faktor sumber daya alam dalam berbagai tahapan proses perdamaian hingga pembangunan pasca-konflik. Akhirnya, di penghujung tulisan ini akan disajikan ilustrasi singkat mengenai penerapan berbagai teori yang telah dibahas sebelumnya untuk menganalisis kasus konflik dan perdamaian yang terjadi di Aceh, Indonesia.

Kata kunci: Aceh, kelangkaan, kelimpahan, konflik, pembangunan pasca-konflik, perdamaian, sumber daya alam

DAFTAR ISI

Abstrak ☞ v

Daftar Isi ☞ vii

Daftar Gambar ☞ viii

1. Pendahuluan ☞ 1

2. Kelangkaan Sumber Daya Alam Sebagai Faktor Risiko Konflik ☞ 3

3. Kelimpahan Sumber Daya Alam Sebagai Faktor Risiko Konflik ☞ 9

4. Kontribusi Faktor Sumber Daya Alam bagi Proses Perdamaian dan Pembangunan yang Berkelanjutan ☞ 17

5. Ilustrasi Penerapan pada Kasus Aceh ☞ 21

6. Penutup ☞ 29

Bibliografi Terpilih ☞ 31

Biodata Singkat ☞ 33

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Hubungan Faktor SDA dengan Konflik dan *Human Insecurity* 3
- Gambar 2 Kelangkaan SDA Sebagai Faktor Risiko Konflik 4
- Gambar 3 Hubungan Tingkat Curah Hujan dengan Intensitas Konflik di Darfur, Sudan Selatan 5
- Gambar 4 Konflik Akibat Kelangkaan SDA dalam Model Homer-Dixon 6
- Gambar 5 Kelimpahan SDA Sebagai Faktor Risiko Konflik 9
- Gambar 6 Fenomena *Resource Curse* di Indonesia 10
- Gambar 7 Fenomena *Resource Curse* di Provinsi Kalimantan Timur 11
- Gambar 8 Kerangka Penjelasan Konflik Berdasarkan Karakteristik SDA 12
- Gambar 9 Kontribusi Kelimpahan SDA terhadap Dinamika Konflik 14
- Gambar 10 Peran SDA dalam Pencegahan dan Transformasi Konflik, Pengembangan Perdamaian, dan Pembangunan Berkelanjutan 17
- Gambar 11 Seri Publikasi *Environmental Peacebuilding yang Diterbitkan atas Kerja Sama UNEP dengan Berbagai Lembaga Lain* 18
- Gambar 12 Kerangka Memahami Peran SDA dalam Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh 21
- Gambar 13 Peran SDA dalam Siklus Konflik di Aceh 22
- Gambar 14 Peran SDA Sebagai Landasan dan Insentif Perdamaian di Aceh 24
- Gambar 15 Pelajaran dari Aceh mengenai Peran Penting Faktor SDA 26

1

PENDAHULUAN

Dalam studi konflik dan perdamaian, faktor sumber daya alam mendapatkan tempat tersendiri karena perannya yang mendua. Di satu sisi, sumber daya alam dapat menjadi sumber ketegangan sosial dan bahkan pemicu konflik. Di sisi lain, sumber daya alam juga dapat menjadi landasan membangun perdamaian sekaligus menjaga keberlanjutannya. Lebih jauh, dalam studi pembangunan faktor sumber daya alam juga dilihat sebagai salah satu kepedulian utama dalam pengembangan pembangunan yang waspada konflik (*conflict-sensitive development*). Hal ini agar proses pembangunan yang dijalankan dapat menghindari terjadinya konflik terkait sumber daya alam dan sebaliknya, justru dapat menjamin terpenuhinya berbagai aspek keamanan insani (*humanan security*).

Menyadari peran penting sumber daya alam seperti diilustrasikan di atas, tulisan ini bermaksud menyajikan survei teoritis secara singkat atas sejumlah literatur yang menjelaskan peran sumber daya alam sebagai faktor kunci dalam dinamika konflik yang berskala besar maupun dalam berbagai upaya perdamaian. Sejumlah literatur dari berbagai sudut pandang teoritis akan dipaparkan untuk memahami bagaimanakah keterkaitan (*nexus*) antara sumber daya alam dengan kemunculan konflik, proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik dapat dijelaskan dengan berdasarkan ilustrasi kasus dari sejumlah negara.

Tiga pertanyaan pemandu diajukan untuk mengarahkan pembahasan dalam tulisan ini. Pertama, dalam kondisi apa dan bagaimana sumber daya alam menjadi faktor risiko (*risk factor*) yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik yang disertai dengan kekerasan (*violent conflict*)? Kedua, bagaimana sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi faktor peluang (*opportunity factor*) yang akan melandasi upaya-upaya penyelesaian konflik, proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik? Ketiga, bagaimana kerangka teoritis mengenai peran sumber daya alam dalam dinamika konflik dan perdamaian ini diterapkan untuk menganalisis kasus konflik berskala besar yang terjadi di Indonesia?

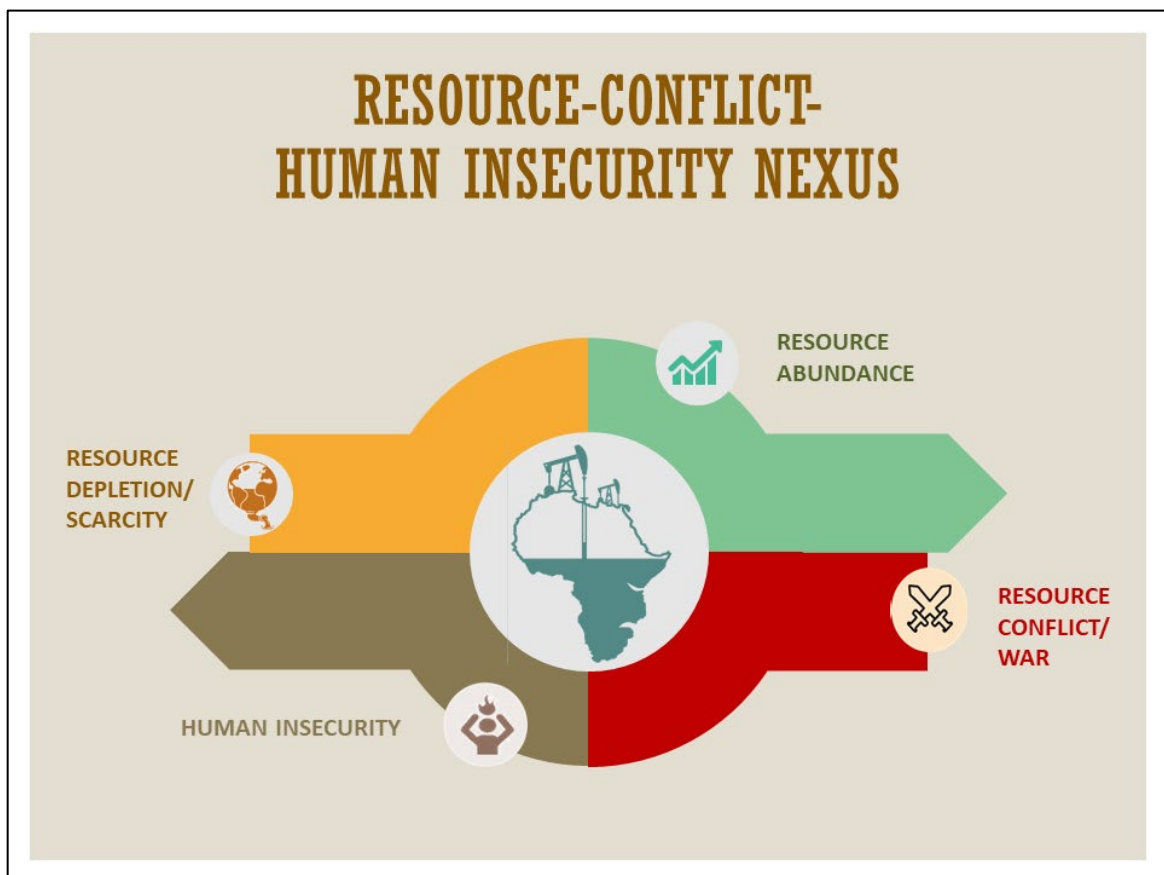
Berdasarkan pertanyaan pemandu di atas, sistematika tulisan ini terdiri atas tiga pokok pembahasan sebagai berikut. Pertama-tama, akan diulas terlebih dahulu beberapa pandangan teoritis mengenai peran yang dimainkan oleh faktor sumber daya alam, baik dalam kondisi kelangkaan maupun kelimpahannya, dalam memicu

terjadinya konflik yang berskala besar di berbagai negara. Kedua, akan diuraikan beberapa pandangan teoritis mengenai peran penting yang dapat dimainkan faktor sumber daya alam dalam berbagai upaya penyelesaian konflik, proses perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. Akhirnya, di penghujung tulisan ini akan disajikan ilustrasi singkat mengenai penerapan berbagai teori tersebut untuk menganalisis kasus konflik dan perdamaian yang terjadi di Aceh, Indonesia.

2

KELANGKAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI FAKTOR RISIKO KONFLIK

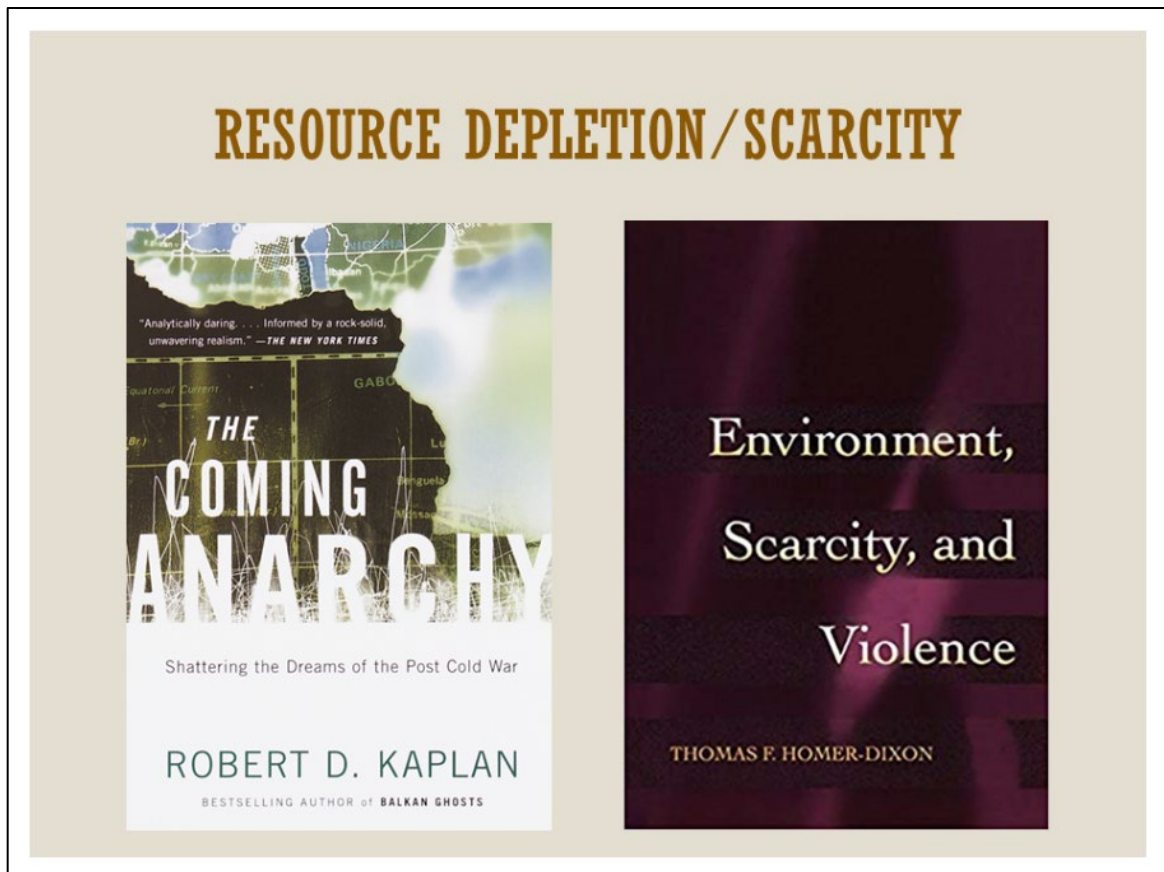
Terdapat dua pandangan teoritis yang berlainan dalam melihat peran sumber daya alam sebagai pemicu konflik dengan kekerasan (*violent conflict*). Pandangan pertama melihat kondisi kelangkaan (*scarcity*) atau kemerosotan (*depletion*) suatu sumber daya alam sebagai sebuah faktor risiko (*risk factor*) bagi terjadinya konflik dan *human insecurity* (ketidakamanan insani). Pandangan kedua, sebaliknya, justru melihat kondisi kelimpahan (*abundance*) suatu sumber daya alam sebagai sebuah faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik dan *human insecurity*.



Gambar 1 Hubungan Faktor SDA dengan Konflik dan *Human Insecurity*

Dalam kenyataannya, kedua kondisi sumber daya alam tersebut (kelangkaan maupun kelimpahan) memang sama-sama dapat memicu konflik dengan kekerasan,

sekalipun dengan karakteristik yang berlainan (**Gambar 1**). Terdapat banyak konflik yang meledak di seputar persaingan keras memperebutkan sumber daya alam yang langka atau yang kualitas dan kuantitasnya mengalami kemerosotan. Pada saat yang sama, terdapat banyak pula konflik disertai kekerasan yang meledak justru pada kondisi kelimpahan sumber daya alam, hanya saja di situ terdapat ketidakadilan dalam akses dan distribusi manfaatnya.

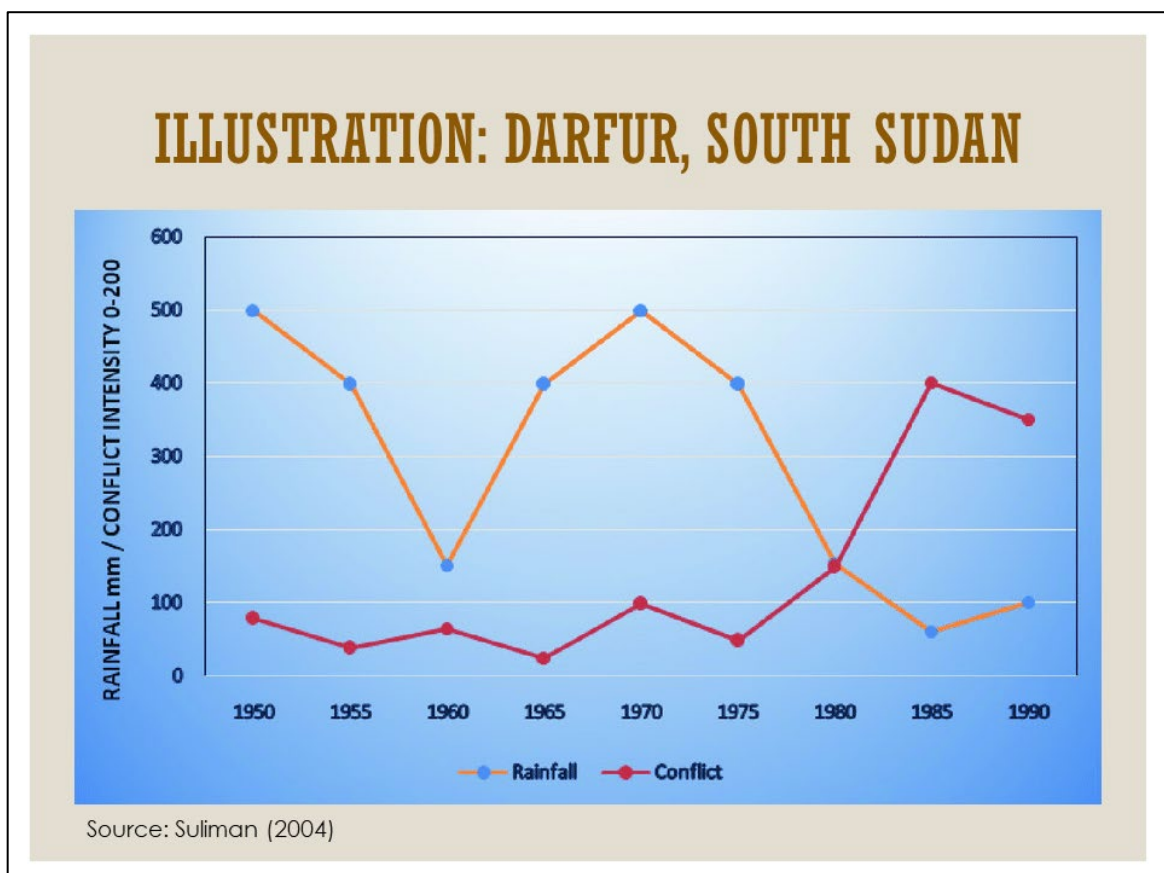


Gambar 2 Kelangkaan SDA Sebagai Faktor Risiko Konflik

Salah satu publikasi penting yang mewakili pandangan pertama adalah artikel Robert D. Kaplan yang berjudul *The Coming Anarchy*. Artikel ini meramalkan bahwa seiring dengan ledakan populasi dunia sementara ketersediaan sumber daya alam makin menipis, umat manusia dihadapkan pada potensi ancaman anarki di masa depan. Ketika pertama kali terbit pada 1994, karya “provokatif” ini cukup menggemparkan dan bahkan disejajarkan dengan dua karya “nujuman” lain pada periode itu, yaitu *Clash of Civilizations* karya Samuel P. Huntington dan *The End of History and the Last Man* karya Francis Fukuyama (**Gambar 2**). Artikel ini kemudian dikembangkan Kaplan menjadi sebuah buku yang terbit pada tahun 2000 dengan judul yang sama. Namun, secara akademik, teoritisasi lebih mendalam mengenai

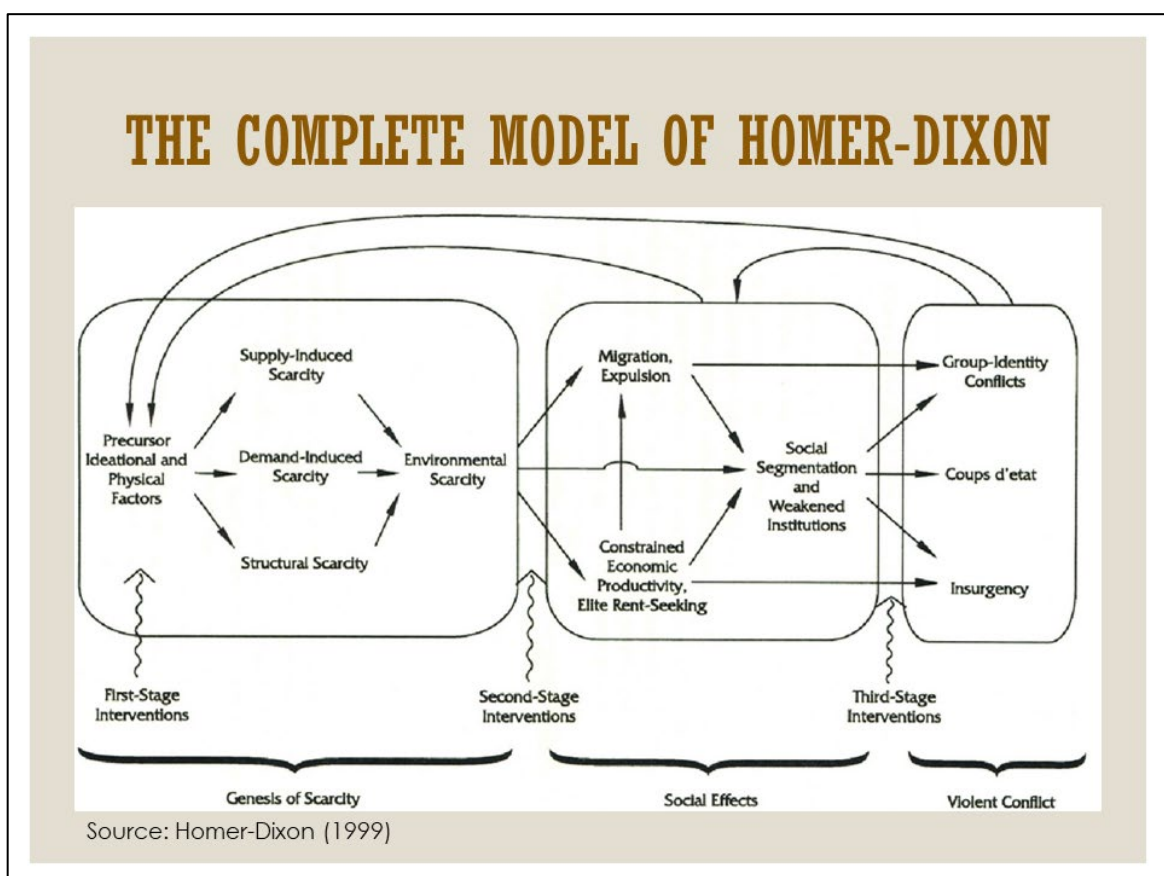
kelangkaan sumber daya alam sebagai pemicu konflik ini sebenarnya dilakukan oleh Thomas F. Homer-Dixon dalam karya seminalnya *Environment, Scarcity, and Violence* yang terbit pada tahun 1999 (**Gambar 2** di atas).

Ilustrasi dari pandangan pertama ini dapat dicontohkan pada konflik etnis yang terjadi di Sudan Selatan yang kini sudah lepas dari Sudan dan menjadi negara merdeka. Seperti ditunjukkan pada **Gambar 3** di bawah, fluktuasi insiden konflik selama kurun waktu 1950 hingga 1990 di Darfur, Sudan Selatan ternyata berkaitan dengan tinggi rendahnya curah hujan yang turun pada periode yang bersamaan. Begitulah, ketika tingkat curah hujan terus merosot sejak dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an, pada periode itu pula terjadi laju peningkatan konflik yang meningkat secara tajam. Kasus di Darfur ini menyajikan satu contoh yang menarik mengenai hubungan antara kelangkaan sumber daya alam (dalam hal ini adalah air yang sangat berharga di daerah gurun pasir) dengan peningkatan kompetisi di antara para pengguna sumber daya yang langka ini. Kompetisi tersebut, dalam konteks sosial-budaya masyarakat yang sangat plural secara ras dan agama, pada akhirnya memicu terjadinya konflik dengan kekerasan.



Gambar 3 Hubungan Tingkat Curah Hujan dengan Intensitas Konflik di Darfur, Sudan Selatan

Meski demikian, hubungan kausalitas yang terjadi antara faktor kelangkaan sumber daya alam dengan insiden konflik disertai kekerasan tidaklah berlangsung selinier seperti yang digambarkan di atas. Dengan berdasarkan studi perbandingan kasus-kasus konflik di berbagai negara, Homer-Dixon menegaskan bahwa hubungan antara faktor kelangkaan sumber daya alam dengan kemunculan konflik tidaklah bersifat deterministik dan linier, melainkan jauh lebih kompleks. Dari sini Homer-Dixon kemudian merumuskan sebuah model teoritis yang lebih komprehensif dan mencakup tiga kelompok variabel yang saling memengaruhi berikut ini. Pertama adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan asal-usul dari kelangkaan suatu sumber daya alam (*genesis of scarcity*). Kedua adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan dampak sosial (*social effects*) yang ditimbulkan oleh kelangkaan sumber daya alam tersebut. Dan ketiga adalah variabel-variabel yang berkaitan dengan jenis-jenis konflik dengan kekerasan yang dapat ditimbulkan oleh kedua kelompok variabel sebelumnya (**Gambar 4**).



Gambar 4 Konflik Akibat Kelangkaan SDA dalam Model Homer-Dixon

Berdasarkan Gambar 4 di atas dapat dijelaskan secara ringkas bahwa sumber kelangkaan sumber daya alam ini dapat ditimbulkan oleh sisi *supply*, yakni pasokan

sumber daya alam yang semakin terbatas, misalnya saja kondisi curah hujan yang kian menipis. Atau bisa juga ia tercipta karena *demand* yang semakin meningkat terhadap sumber daya alam tertentu, apalagi apabila di situ terdapat situasi *open access*. Dalam kondisi demikian, maka kelangkaan pun terjadi karena daya dukung alam yang tidak dapat lagi memenuhi peningkatan *demand* yang tidak terkendali. Akhirnya, terdapat satu jenis kelangkaan sumber daya alam yang lebih bersifat struktural (*structural scarcity*). Di sini ketersediaan sumber daya alam sebenarnya cukup memadai, bahkan bisa jadi berlebih, namun terjadi kondisi ketidakadilan alokasi dan distribusi sehingga kemudian melahirkan masalah kelangkaan. Ketiga faktor inilah yang menjadi sumber penyebab terjadinya *environmental scarcity*.

Uraian di atas adalah satu kelompok variabel di dalam model Homer-Dixon yang menjelaskan mengenai asal-usul kelangkaan sumber daya alam. Dari sini lalu terjadi rangkaian dampak sosial yang dalam model Homer-Dixon merupakan satu kelompok variabel tersendiri. Sebagai misal, kelangkaan sumber daya alam dapat memicu migrasi keluar, bahkan juga pengusiran atas kelompok minoritas, ketika terjadi kompetisi atas sumber daya alam yang terbatas. Di Australia, misalnya, pasca kebakaran hutan yang sangat luas belum lama ini, banyak onta yang sengaja dibunuh karena populasinya berkembang terlalu banyak sehingga bersaing dengan manusia dalam konsumsi air. Tetapi di Darfur, kelangkaan air seiring curah hujan yang semakin kecil telah memicu kompetisi antar sesama manusia yang berujung pada konflik antar-etnis. Pada akhirnya, kondisi ini juga menyebabkan pelemahan atas institusi negara sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin perlindungan dan keamanan warganya.

Kombinasi dari kesemua dampak sosial itu kemudian berujung pada konflik skala luas yang disertai dengan kekerasan. Konflik semacam ini makin berpeluang terjadi dalam konteks masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok identitas, seperti kelompok etnis atau agama yang berlainan. Selain itu, konflik berskala luas ini juga dapat berupa kudeta golongan militer terhadap pemerintahan yang sah. Kemungkinan bentuk lain dari konflik berskala luas ini adalah meluasnya aspirasi separatisme yang kemudian melahirkan pemberontakan bersenjata. Berbagai tipe konflik dengan kekerasan inilah yang menjadi kelompok variabel terakhir di dalam model Homer-Dixon.

Dewasa ini isu kelangkaan sumber daya alam makin mencuat dalam konteks perubahan iklim yang berlangsung pada skala global. Perubahan iklim global ini telah mengakibatkan banyak dampak lingkungan, seperti kenaikan permukaan air laut, tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Seiring dengan meluasnya berbagai dampak lingkungan itu, maka

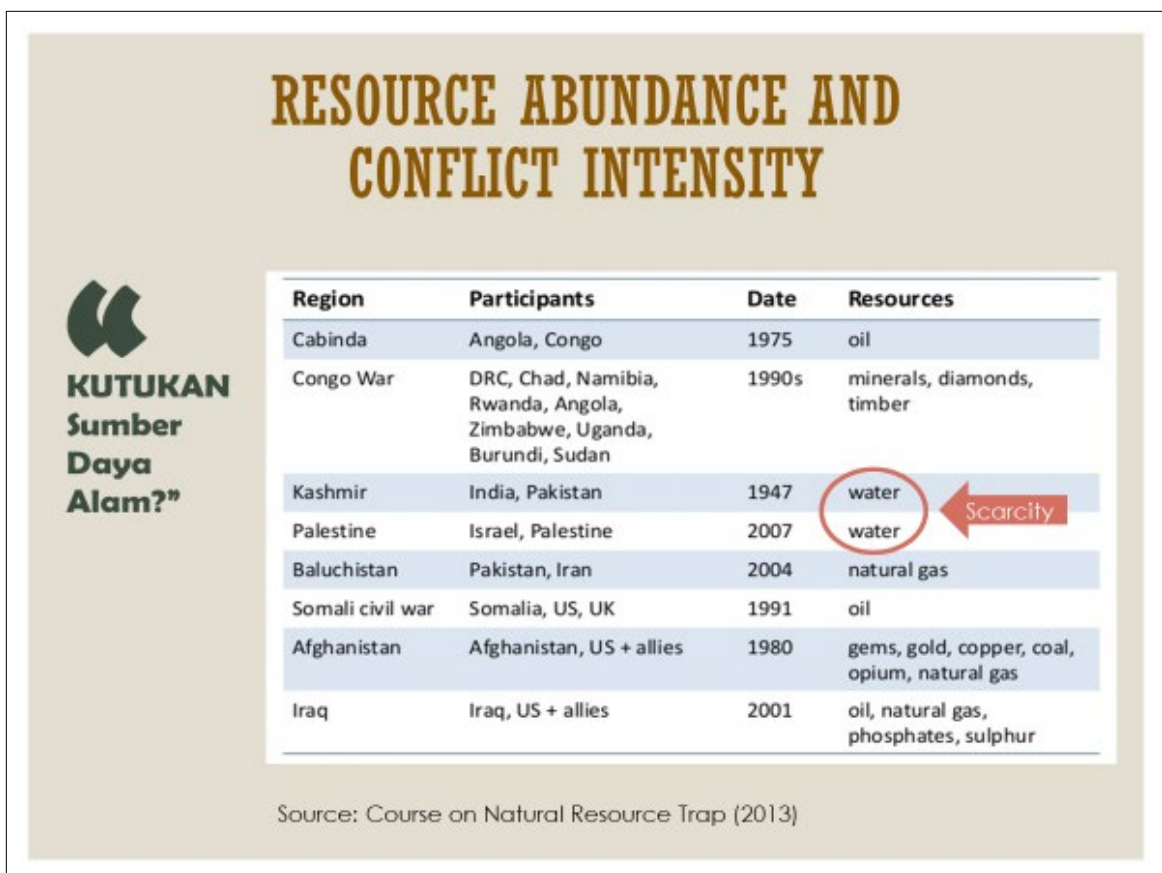
akses terhadap tanah, air bersih, pangan dan sebagainya juga semakin kompetitif. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu terjadinya konflik berskala luas yang disertai pula dengan fenomena *environmental refugees* (pengungsian lintas negara yang dipicu oleh faktor bencana alam).

Sejalan dengan itu, kini muncul pula isu *depletion*, yakni semakin menipisnya cadangan kekayaan alam suatu negara. Sebagai contoh, cadangan minyak di Arab Saudi diperkirakan hanya tersisa untuk 50 tahun lagi, dan kondisi ini sedikit banyak berpengaruh pada peningkatan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dewasa ini. Berbagai kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik akan melahirkan konflik regional yang semakin luas pada masa-masa mendatang.

3

KELIMPAHAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI FAKTOR RISIKO KONFLIK

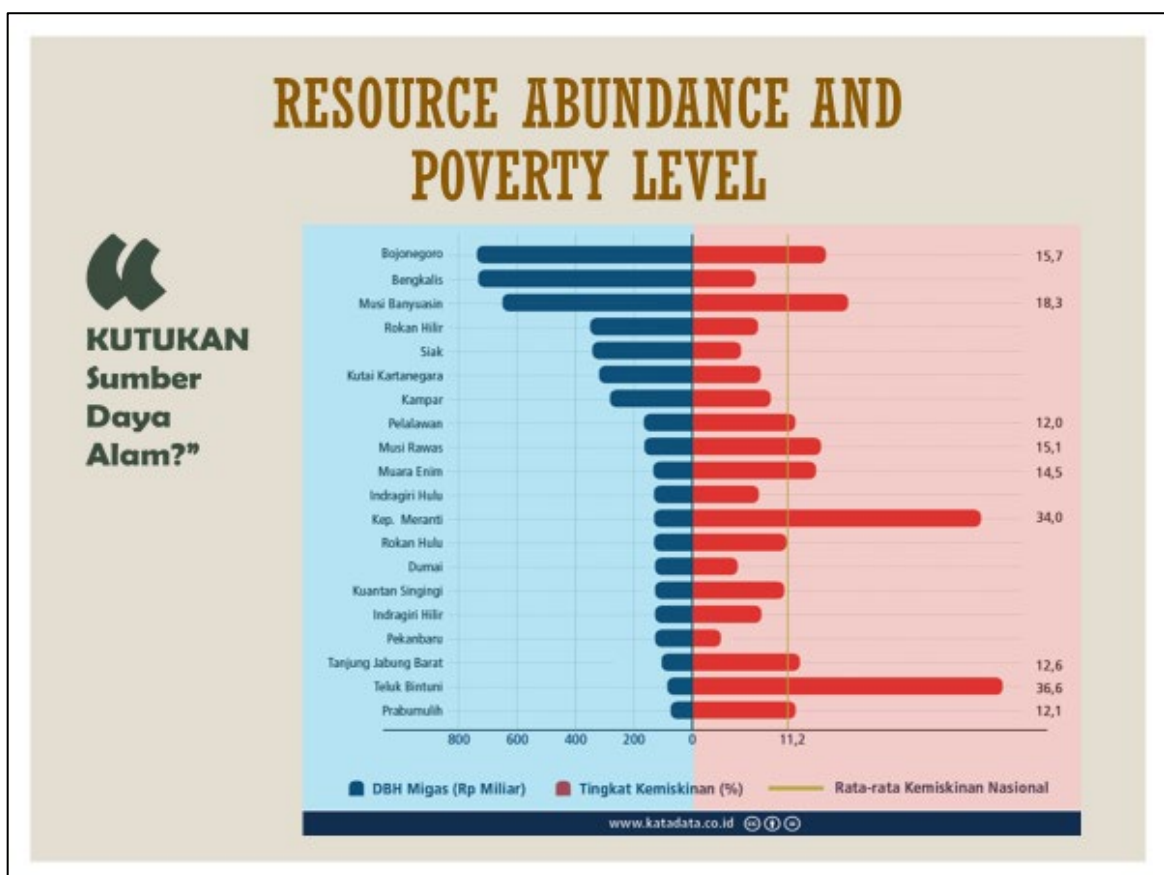
Sumber daya alam sebagai faktor risiko bagi terjadinya konflik ternyata tidak dipicu oleh kondisi kelangkaan sumber daya alam maupun kemerosotannya semata. Apabila dikaji konflik-konflik di berbagai belahan dunia, memang terdapat situasi di mana kelangkaan sumber daya alam menjadi faktor kunci yang memicu konflik, seperti pada kasus kompetisi atas tanah dan air yang mendasari konflik di Palestina dan Kashmir. Tetapi, jika ditinjau lebih luas, konflik berskala besar justru paling banyak terjadi di negara-negara dengan sumber daya alam yang cukup melimpah (lihat **Gambar 5**). Hal ini dapat misalnya dilihat pada kasus perang di Cabinda dan Somalia (konflik terkait minyak), Baluchistan (konflik terkait gas), Kongo (konflik terkait berlian, mineral, dan kayu), dan lain sebagainya.



Gambar 5 Kelimpahan SDA sebagai Faktor Risiko Konflik

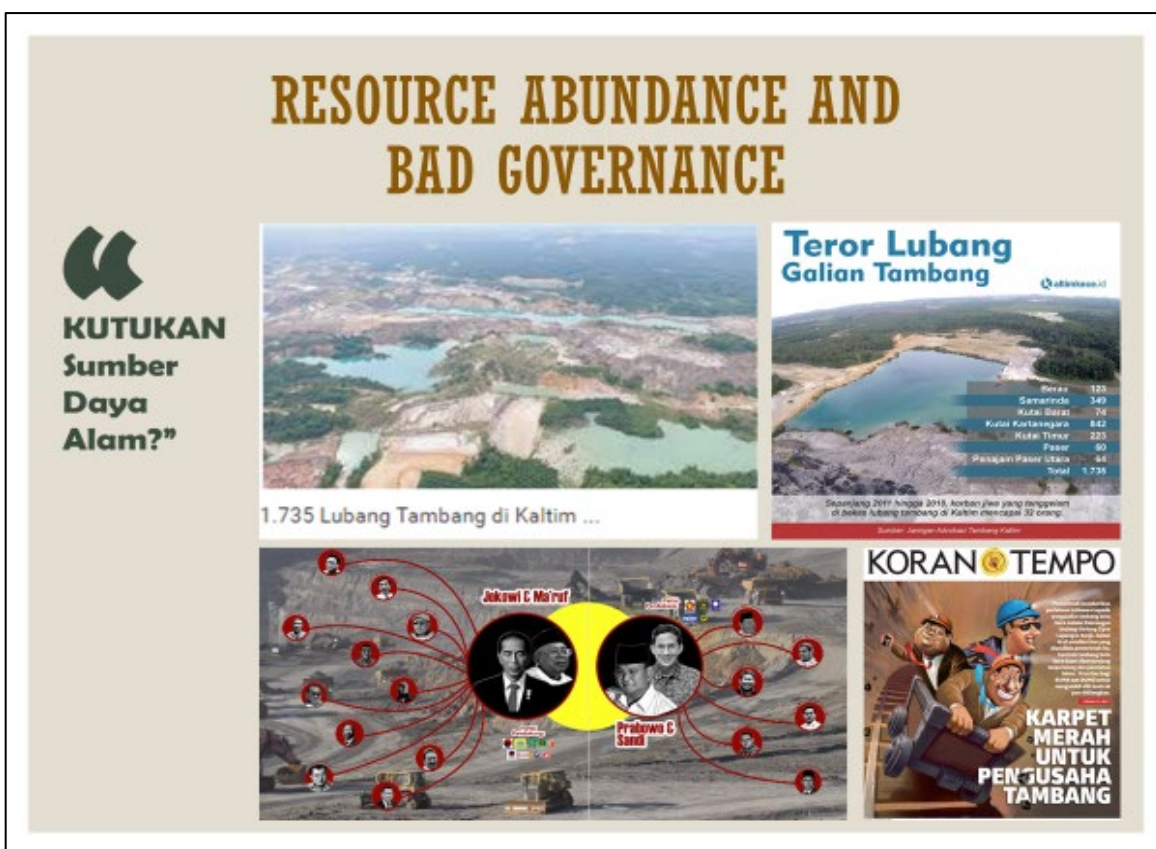
Berbeda dari pandangan pertama, faktor kelimpahan sumber daya alam inilah yang menjadi penekanan dalam pandangan teoritis yang kedua. Berbagai literatur dalam pandangan terakhir ini menyatakan bahwa kelangkaan sumber daya alam bukan faktor utama yang memicu konflik. Alih-alih, pemicu konflik yang jauh lebih menonjol adalah kondisi sebaliknya, yakni situasi di mana sumber daya alam justru tersedia cukup melimpah. Inilah yang kemudian turut mendasari konseptualisasi atas apa yang disebut sebagai *resource curse* atau “kutukan sumber daya alam”.

Pengertian *resource curse* di sini tidak terbatas pada insiden konflik dengan kekerasan yang tinggi di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Lebih dari itu, ia juga mengacu pada aneka eksternalitas negatif lainnya, seperti angka kemiskinan yang tinggi, kegagalan tata kelola berbagai institusi publik, dan juga merebaknya korupsi. Sebagai ilustrasi, banyak kabupaten penghasil minyak dan gas (migas) di Indonesia, seperti Kabupaten Bojonegoro dan Musi Banyuasin (lihat **Gambar 6**), justru ditandai oleh tingkat kemiskinan yang berada di atas rata-rata angka nasional. Hal ini tentu merupakan sebuah ironi tersendiri karena daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah justru masih dibelit oleh masalah kemiskinan yang cukup akut.



Gambar 6 Fenomena *Resource Curse* di Indonesia

Selain kemiskinan, beberapa kabupaten di Indonesia yang memiliki kekayaan batu bara yang melimpah juga ditandai oleh bencana ekologis yang parah. Banyak sekali lubang-lubang bekas galian tambang dibiarkan terbuka begitu saja dan tidak direklamasi sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur saja terdapat paling tidak 1.735 lubang bekas galian tambang yang dibiarkan terbuka sehingga mengancam keselamatan jiwa manusia. Sepanjang 2011 hingga 2018, tercatat tidak kurang dari 32 jiwa yang meninggal karena tenggelam di kolam-kolam raksasa akibat lubang-lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka ini (**Gambar 7**).

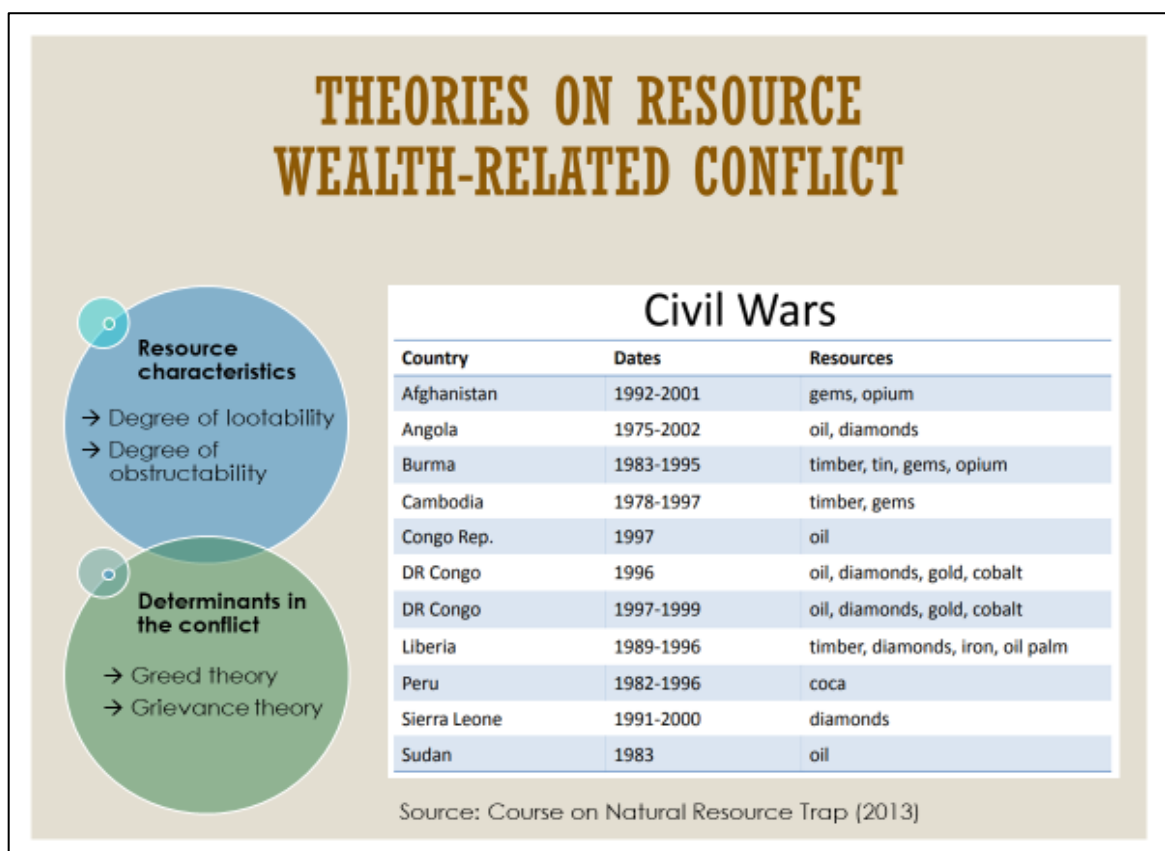


Gambar 7 Fenomena *Resource Curse* di Provinsi Kalimantan Timur

Pada saat yang sama, seperti ditunjukkan Gambar 7, kenyataan menunjukkan betapa faktor kekayaan batu bara ini bersinggungan erat dengan dinamika politik. Sebagai contoh, salah satu isu yang ramai dibicarakan selama Pemilihan Presiden 2019 yang lalu adalah dukungan finansial dari para pengusaha tambang. Setelah dicermati, ternyata dukungan finansial ini sama-sama dinikmati kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja, dukungan dana yang melimpah ini tidaklah cuma-cuma. Laporan investigasi Koran Tempo (20/1/2020) menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja yang disusun pemerintah memberikan karpet merah untuk

pengusaha tambang. Perlakuan istimewa ini dalam bentuk perpanjangan kontrak tambang yang tanpa lelang dan keharusan penciptaan lahan, penghapusan prioritas bagi BUMN dan BUMD untuk mengambil alih kontrak tambang, dan sebagainya. Pada kenyataannya, perlakuan istimewa ini sebenarnya adalah cerminan dari *weakened institutions*, yaitu kebijakan negara yang justru tersandera oleh oligarki tambang.

Apabila dikaji lebih lanjut, ternyata ada dua isu penting yang banyak dibahas dalam literatur mengenai faktor kelimpahan sumber daya alam sebagai pemicu konflik dengan kekerasan ini (lihat dua lingkaran pada sisi kiri **Gambar 8**). Isu yang pertama adalah karakteristik dari sumber daya alam itu sendiri berdasarkan sejauh mana tingkat kemudahan atau, sebaliknya, hambatan di dalam eksploitasinya. Ada jenis-jenis sumber daya alam yang karakteristiknya memang mudah dieksploitasi tanpa membutuhkan teknologi yang canggih, seperti berlian yang banyak terdapat di sejumlah negara di Afrika. Namun, ada juga beberapa jenis sumber daya alam yang eksploitasinya memang sulit dan menuntut penggunaan teknologi yang tinggi, seperti minyak dan gas. Batu bara sebenarnya merupakan bahan tambang yang teknologi eksploitasinya tidaklah sekompleks pada minyak dan gas, namun tetap saja hal itu terlalu canggih dan mahal untuk mampu dilakukan rakyat kebanyakan.



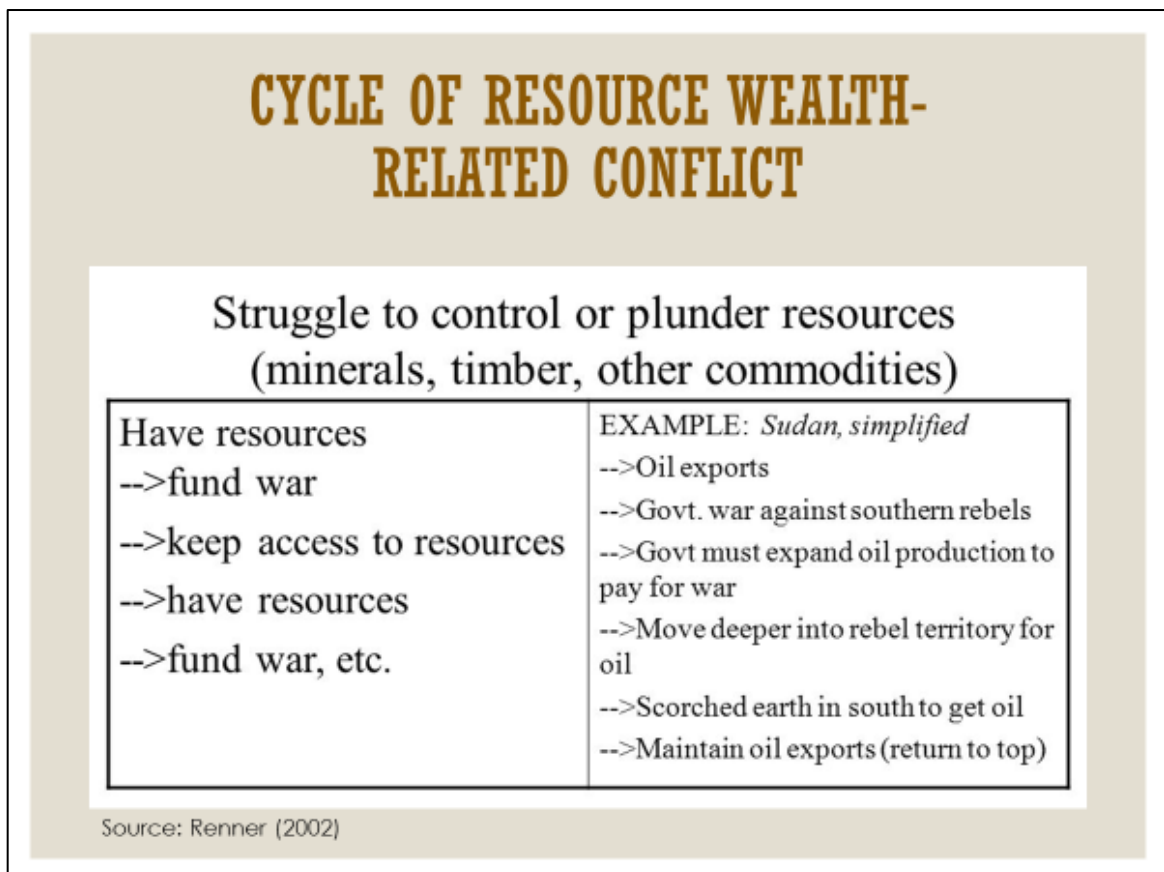
Gambar 8 Kerangka Penjelasan Konflik Berdasarkan Karakteristik SDA

Perbedaan dalam corak teknologi eksploitasi sumber daya alam ini ternyata dapat memicu dinamika dan karakter konflik yang berbeda pula. Oleh karena itu, literatur tentang faktor kelimpahan sumber daya alam ini selanjutnya menyatakan bahwa untuk jenis sumber daya alam yang mudah dieksploitasi, maka konflik yang timbul kebanyakan bersifat horizontal di antara sesama kelompok masyarakat. Hal ini karena berbagai kelompok masyarakat mampu mengambilnya dengan mudah sehingga kemudian terjadi kompetisi yang sangat keras di antara mereka sendiri. Di beberapa negara penghasil berlian di Afrika, misalnya Sierra Leone, kelompok-kelompok yang terlibat dalam ekstraksi berlian bahkan dapat mempersenjatai diri. Dengan pendapatan besar yang diperoleh dari perdagangan berlian secara ilegal, mereka mampu membeli senjata api dari pasar gelap baik untuk tujuan membela diri maupun menumpas pihak lawan. Akibatnya, intensitas kekerasan pun sangat tinggi dan konflik menjadi berlarut-larut. Untuk merespons kondisi ini, konsumen di negara Barat kemudian menciptakan suatu mekanisme sertifikasi dalam rangka memastikan bahwa berlian yang dibeli bukan berasal dari wilayah konflik.

Sebaliknya, jika eksploitasi suatu sumber daya alam membutuhkan investasi dan teknologi yang tinggi seperti migas, maka kecenderungan konflik yang terjadi adalah bersifat vertikal, yaitu konflik antara negara dengan kelompok masyarakat. Dalam beberapa kasus di Indonesia, konflik vertikal ini bahkan mengambil bentuk gerakan separatisme bersenjata, misalnya di Aceh dan beberapa wilayah di Papua. Tentu saja, tidak semua kasus akan berakhir pada kondisi semacam ini. Kalimantan Timur, misalnya, juga mempunyai kekayaan migas yang besar, tetapi di sana tidak muncul konflik separatisme. Hanya pada kondisi tertentu, misalnya ketika faktor kelimpahan sumber daya alam ini berjaln berkelindan dengan sejarah ketegangan daerah dengan pusat seperti dialami oleh Aceh, maka ketidakpuasan menyangkut distribusi manfaat dari kelimpahan sumber daya alam Aceh ini dapat mempertebal *political grievance* yang sudah ada sebelumnya dan pada gilirannya memperkuat aspirasi separatisme.

Isu berikutnya yang juga banyak diangkat adalah menyangkut motivasi dari konflik yang terkait dengan sumber daya alam. Seperti ditunjukkan pada Gambar 8 di atas (lihat lingkaran di kiri bawah), literatur mengenai isu ini membedakan dua motivasi yang mendasari konflik terkait dengan sumber daya alam, yakni motivasi ekonomi dan motivasi politik. Kedua motivasi inilah yang kemudian diistilahkan dengan *greed theory* dan *grievance theory*. Berdasarkan teori pertama, konflik seperti terjadi di negara-negara Afrika penghasil berlian akan dijelaskan sebagai bentuk “keserakahan”, yaitu lebih didorong oleh motivasi keuntungan ekonomi melalui eksploitasi cadangan berlian yang melimpah. Namun, kasus konflik seperti

terjadi di Sudan Selatan yang kaya minyak, akan dilihat lebih mencerminkan teori yang kedua, yaitu konflik yang lebih didorong oleh motivasi politik. Di sini faktor ketidakpuasan politik penduduk Sudan Selatan atas kelimpahan kekayaan alam di wilayahnya dianggap sebagai penjelasan yang lebih memuaskan terhadap gerakan separatisme di kawasan ini dan sekaligus respons pihak pemerintah Sudan yang sangat represif terhadap gerakan tersebut (**Gambar 9**).



Gambar 9 Kontribusi Kelimpahan SDA terhadap Dinamika Konflik

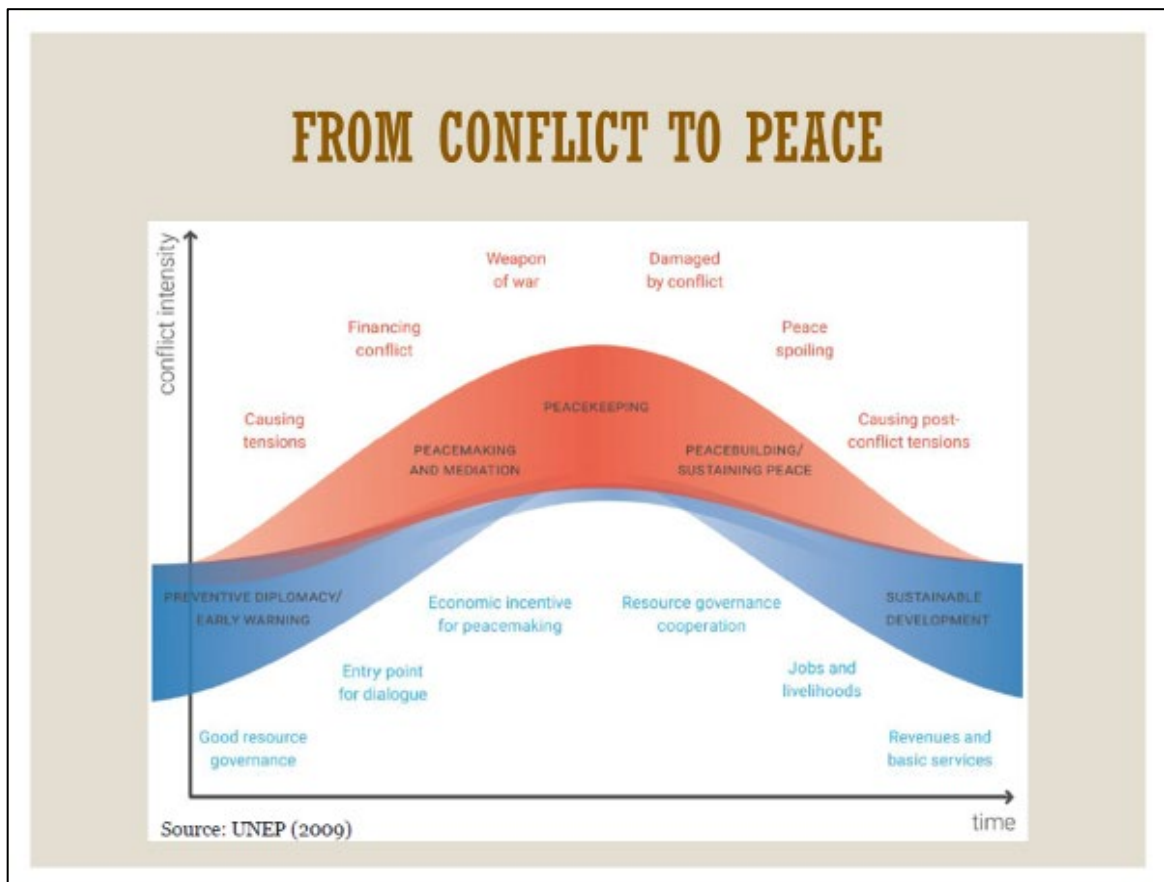
Namun, ketika konflik yang terkait sumber daya alam sudah terjadi, apa pun pemicu awalnya, maka antara motivasi *greed* dan *grievance* ini bisa saling berjaln berkelindan satu sama lain. Konflik di Aceh, misalnya, sering dijelaskan sebagai *resource war* karena ia turut dipicu oleh ketidakpuasan politik yang dirasakan oleh rakyat Aceh terkait pembagian kekayaan alam yang dieksploitasi dari bumi Aceh. Dengan kata lain, faktor *grievance* merupakan motivasi penting dalam kemunculan gerakan separatisme Aceh. Namun, begitu konflik telah meluas, maka sumber daya alam di Aceh yang bersifat *lootable* (mudah dieksploitasi) seperti kayu, ganja, dan sebagainya pada akhirnya juga menjadi insentif bagi para pelaku konflik (baik pihak separatis maupun militer Indonesia) untuk memperpanjang kondisi konflik. Sebab,

kondisi konflik yang berlarut-larut akan memungkinkan mereka melakukan kegiatan ekonomi ilegal yang menguntungkan, seperti pembalakan kayu, pengedaran ganja, bahkan perdagangan senjata. Dengan begitu, maka kelimpahan sumber daya juga berperan membiayai konflik dan membuatnya berkepanjangan (lihat **Gambar 9**).

4

KONTRIBUSI FAKTOR SUMBER DAYA ALAM BAGI PROSES PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Sumber daya alam tidak hanya merupakan faktor risiko yang meningkatkan peluang terjadinya konflik berskala besar, akan tetapi juga dapat menjadi faktor peluang (*opportunity factor*) bagi keberhasilan upaya menciptakan perdamaian dan konsolidasinya agar dapat berkelanjutan. Dengan kata lain, faktor sumber daya alam sebenarnya juga dapat dikembangkan sebagai landasan menjalankan upaya-upaya untuk mencegah konflik, menghentikannya ketika sudah terjadi secara luas, mewujudkan solusi perdamaian yang komprehensif, dan pada akhirnya juga untuk mengarahkan proses pembangunan pasca-konflik yang berkelanjutan (Gambar 10).



Gambar 10 Peran SDA dalam Pencegahan dan Transformasi Konflik, Pengembangan Perdamaian, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka kerja PBB pada **Gambar 10** di atas, terdapat urgensi besar untuk memperhitungkan kontribusi faktor sumber daya alam dalam keseluruhan upaya pencegahan konflik hingga penciptaan perdamaian dan konsolidasinya. Hal ini dimulai sejak tahap mediasi dan perundingan damai (*peace mediation and negotiation*), tahap pengembangan perdamaian dan konsolidasinya (*peace building and consolidation*), hingga tahap pembangunan pasca-konflik yang menjamin keamanan insani (*human security*) dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan hal ini, PBB melalui United Nations Environment Programme (UNEP) mengeluarkan berbagai dokumen mulai diskursus pembangunan yang lebih teoritis hingga berbagai *tools* yang menyajikan panduan praktis. Bersama sejumlah lembaga riset dan perguruan tinggi, UNEP juga menerbitkan seri publikasi mengenai *environmental peacebuilding* yang menekankan pentingnya sumber daya alam dan lingkungan diintegrasikan dalam berbagai program pembangunan, inisiatif penyelesaian konflik, dan juga berbagai operasi PBB dalam rangka menjalankan misi *peace making*, *peace keeping* maupun *peace building* (**Gambar 11**).



Gambar 11 Seri Publikasi *Environmental Peacebuilding* yang Diterbitkan atas Kerja Sama UNEP dengan Berbagai Lembaga Lain

Salah satu publikasi UNEP ini secara khusus mengelaborasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata pada lingkungan dan sumber daya alam dan bagaimana hal ini dinilai dan sekaligus ditangani sebagai bagian tak terpisahkan dari program perdamaian dan pembangunan pasca-konflik. Sebagai contoh, selama Perang Teluk dulu atau pada perang di Syria baru-baru ini banyak ladang minyak dibumihanguskan sebagai bagian dari strategi perang. Hal ini telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa sumber daya alam dan lingkungan tidak saja dapat menjadi faktor risiko bagi terjadinya konflik, melainkan juga dapat menjadi kondisi yang terdampak oleh dinamika konflik itu sendiri. Oleh karena itu, upaya penanganan atas berbagai dampak ekologis dari konflik juga harus menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik itu sendiri dan pembangunan pasca-konflik.

Buku-buku UNEP lain ada yang membahas jenis-jenis sumber daya alam yang spesifik, seperti sumber daya mineral yang bernilai tinggi maupun air dan tanah sebagai sumber daya alam yang bersifat terbarukan. Di sini fokus penekanannya adalah pada bagaimana berbagai sumber daya alam ini dapat dihindarkan menjadi sumber penyebab konflik dan, sebaliknya, justru dapat memperkuat kerja sama dan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Akhirnya, isu terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam juga menjadi pokok bahasan tersendiri dalam salah satu seri publikasi UNEP ini yang dibedakan menurut berbagai jenis sumber daya alamnya, baik yang bersifat ekstraktif seperti bahan tambang maupun terbarukan seperti hutan dan produk pertanian. Perbaikan tata kelola sumber daya alam ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam rangka menjamin bahwa proses pembangunan dapat bersifat sensitif konflik, menghindari jebakan “*resource curse*”, menjamin keamanan insani, dan dapat berkelanjutan.

5

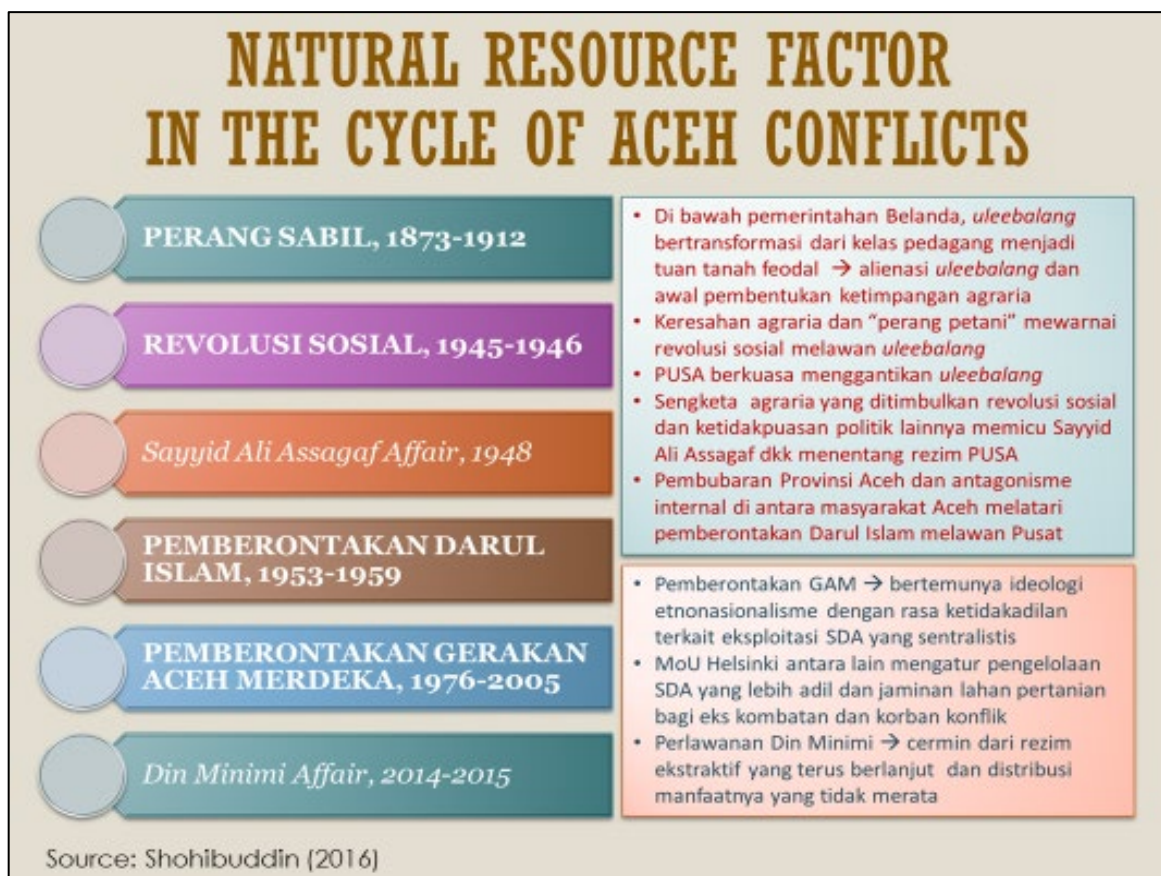
ILUSTRASI PENERAPAN PADA KASUS ACEH

Dengan mendasarkan pada survei singkat atas sejumlah literatur teoritis yang telah diuraikan dalam tiga bab terdahulu, maka peran sumber daya alam dalam dinamika konflik dan perdamaian dapat dipahami secara lebih komprehensif. Sebagai contoh, dengan menerapkan berbagai kerangka teoritis yang telah dibahas tersebut pada kasus konflik dan perdamaian di Aceh, maka dapat ditelusuri secara lebih mendalam bagaimana peran sumber daya alam dalam berbagai siklus konflik dan inisiatif perdamaian yang terjadi di provinsi paling barat kepulauan Nusantara ini. Dalam siklus ini, sumber daya alam dapat menjadi faktor risiko, selanjutnya ia dapat menjadi variabel terdampak, lantas dapat menjadi faktor peluang, dan akhirnya dapat kembali menjadi faktor risiko (lihat **Gambar 12**).



Gambar 12 Kerangka Memahami Peran SDA dalam Siklus Konflik dan Perdamaian di Aceh (Sumber: Shohibuddin, 2018)

Berdasarkan alur siklus pada **Gambar 12** di atas, terlihat bagaimana sumber daya alam dapat menjadi faktor risiko yang memicu beberapa periode konflik Aceh dan bagaimana dinamika konflik itu sendiri selanjutnya juga menimbulkan dampak ekologis dan tenurial yang mendasar di tingkat lokal. Lebih lanjut, siklus tersebut juga memperlihatkan bagaimana sumber daya alam ternyata dapat dikembangkan sebagai faktor peluang dalam rangka mengupayakan berbagai inisiatif perdamaian untuk mengakhiri konflik Aceh. Akan tetapi, bagaimana komplikasi yang kemudian terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian yang disepakati dan selama proses pembangunan pasca-konflik secara keseluruhan dapat memunculkan kembali sumber daya alam sebagai faktor risiko. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan di antara sesama masyarakat Aceh pada masa pasca-konflik yang pada akhirnya berpotensi untuk memicu siklus konflik berikutnya di Aceh.



Gambar 13 Peran SDA dalam Siklus Konflik di Aceh

Apabila berbagai rentetan periode konflik di Aceh diperhatikan dengan cermat (lihat **Gambar 13**), akan terlihat bahwa sumber daya alam sebagai faktor risiko turut berperan dalam memicu terjadinya atau memengaruhi dinamika konflik yang terjadi. Di sini sumber daya alam sebagai faktor risiko memiliki pengertian seperti

didefinisikan teori *grievance*, yaitu bahwa “keresahan sosial” terkait ketidakadilan alokasi dan distribusi manfaat dari sumber daya alam Aceh telah menjadi salah satu pemicu dari berbagai rangkaian konflik yang terjadi di Aceh, mulai dari revolusi sosial melawan *uleebalang* pada paroh terakhir era 1940-an, pemberontakan Darul Islam pada periode 1950-an, hingga paling akhir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005.

Di sisi lain, faktor risiko ini juga dapat ditelusuri lebih lanjut dalam arti peran sumber daya alam dalam membiayai dan melanggengkan konflik itu sendiri (sesuai penjelasan *greed theory*). Di sini, kelimpahan sumber daya alam telah membuat konflik di Aceh menjadi berulang atau berkepanjangan karena banyak pihak yang mendulang keuntungan ekonomi dari situasi konflik di Aceh, baik dari pihak tentara pemerintah sendiri maupun gerilyawan GAM. Sebagai contoh, ada anekdot bahwa aparat bersenjata pergi ke Aceh dengan membawa M16 (jenis senapan serbu), akan tetapi pulang dengan membawa 16 M (jumlah uang). Motif ekonomi serupa ini juga terdapat pada gerilyawan GAM, terutama yang kurang ideologis dan baru direkrut belakangan pasca kejatuhan Orde Baru pada 1998, karena menikmati keuntungan ekonomi dari pemungutan *pajak nangroe*, penjualan ganja, dan lain sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam ini selalu hadir di balik setiap periode konflik, sejak era Perang Sabil hingga sekarang, meski dengan peran yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, selain menjadi faktor risiko, sumber daya alam dan lingkungan di Aceh juga dapat menjadi kondisi yang terdampak oleh dinamika konflik yang berlangsung. Sebagai contoh, konflik di Aceh menimbulkan dampak ekologis atas daya dukung alam di medan perang maupun di lokasi pengungsian dan relokasi. Hal ini karena salah satu strategi kontra-gerilya yang dijalankan tentara pemerintah adalah dengan memindahkan desa-desa di pinggiran hutan yang dapat dijadikan sumber logistik GAM ke lokasi-lokasi pengungsian yang berada di bawah kontrol militer. Tekanan populasi atas sumber daya yang terbatas di lokasi pengungsian telah berdampak pada degradasi lingkungan dan bahkan konflik dengan penduduk setempat. Dampak lebih lanjut dari strategi perang semacam ini adalah membuat lahan pertanian di desa-desa asal menjadi terlantar dan akhirnya berubah menjadi semak belukar dan hutan. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan ketidakpastian penguasaan tanah di desa-desa asal yang telah dikosongkan sehingga rawan untuk diambil alih pihak lain.

Akhirnya, sumber daya alam sebagai faktor peluang untuk menyelesaikan akar persoalan konflik dan sekaligus membangun landasan bagi proses perdamaian yang komprehensif juga diupayakan di Aceh, seperti ditunjukkan **Gambar 14** berikut ini.



Gambar 14 Peran SDA Sebagai Landasan dan Insentif Perdamaian di Aceh

Sebagai contoh, selama perundingan damai antara pimpinan GAM dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia isu-isu rumit seputar keadilan agraria dan distribusi manfaat sumber daya alam berhasil diangkat dan dibicarakan sebagai bagian dari penyelesaian akar persoalan konflik Aceh. Hal ini antara lain mencakup proporsi bagi hasil minyak dan gas untuk Aceh, kewenangan pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah perairan, restitusi hak-hak tenurial dan *property* masyarakat lainnya yang rusak atau hilang selama masa konflik, dan distribusi lahan pertanian kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik.

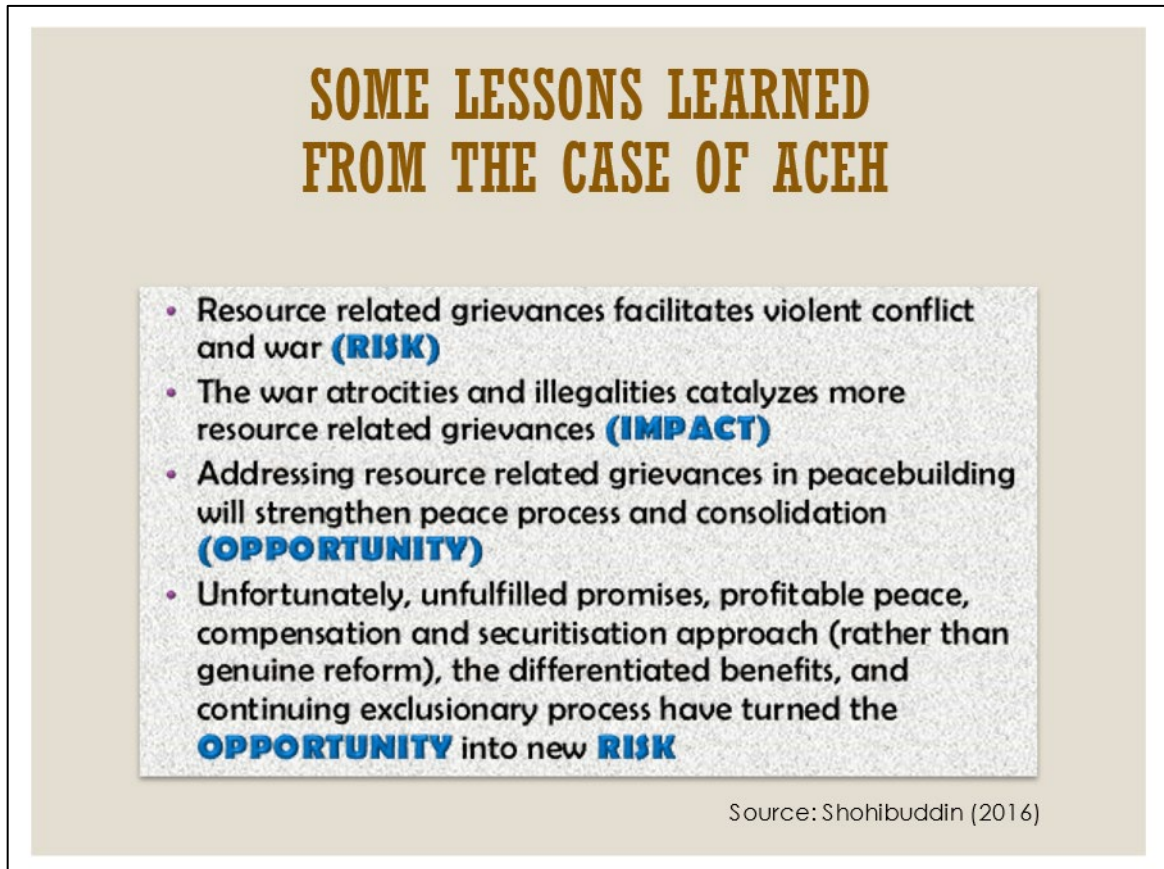
Pada kenyataannya, hanya setelah isu-isu krusial semacam ini dirundingkan dan disepakati (hal mana baru tercapai pada saat perundingan damai di Helsinki), konflik pemerintah dengan GAM yang telah berlangsung selama tiga dekade baru dapat diakhiri secara konklusif dan kesepakatan perdamaian yang komprehensif pun berhasil diwujudkan. Sementara berbagai upaya perdamaian sebelumnya yang didorong oleh berbagai pihak mengalami kegagalan karena pemerintah Indonesia ingin menghindari pembahasan mengenai isu-isu penting ini. Alih-alih, pemerintah Indonesia sebelumnya justru lebih menempuh pendekatan yang bernuansa “iming-iming” (*inducement*), yakni menawarkan para pimpinan dan anggota GAM berbagai

jabatan politik dan konsesi atas sumber daya alam tertentu asalkan mereka mau menghentikan perang dan menyerahkan diri.

Tetapi, setelah konflik Aceh berhasil diselesaikan melalui perjanjian damai di Helsinki dan butir-butir kesepakatan dalam perjanjian ini harus direalisasikan secara konkret di lapangan, ketegangan muncul di antara berbagai pihak termasuk di seputar alokasi dan manfaat sumber daya alam di Aceh. Akibatnya, sumber daya alam kembali menjadi faktor risiko yang melahirkan potensi terjadinya siklus baru konflik di Aceh, meski dengan intensitas yang lebih rendah. Dalam hal ini, proses transisi dan konsolidasi perdamaian merupakan tahapan yang sangat genting dan menentukan. Apabila kedua proses ini ditandai oleh ketidakadilan, misalnya saja *peace dividend* diterima secara tidak merata di antara para gerilyawan dan korban konflik, maka ketegangan akan mengemuka di antara sesama masyarakat Aceh dan hal ini dapat menyebabkan konflik dapat berulang kembali.

Dan hal inilah yang persisnya terjadi di Aceh setelah konflik berakhir. Seiring friksi tajam yang berkembang di tubuh GAM sendiri, maka terjadi komplikasi di dalam pelaksanaan distribusi tanah melalui program kelapa sawit rakyat maupun program-program lain yang terkait dengan alokasi sumber daya alam dan berbagai manfaatnya. Di antara eksekusi dari friksi dan komplikasi ini adalah munculnya “kasus Din Minimi”, yaitu pemberontakan bersenjata oleh puluhan gerilyawan GAM yang meletup pertama kali pada 9 Oktober 2014. Anehnya, pemberontakan ini justru ditujukan kepada pemimpin GAM sendiri yang telah menguasai pucuk pemerintahan di Provinsi Aceh. Kasus ini adalah konflik bersenjata yang paling menonjol pasca perjanjian damai Helsinki, meskipun kemudian berhasil diredam dan didamaikan oleh pemerintah.

Lantas, apa kesimpulan penting dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus Aceh? Pertama, ketidakadilan dalam alokasi sumber daya alam dan hasil kekayaan alamnya turut memfasilitasi terjadinya konflik yang penuh kekerasan dan bahkan perang berskala besar. Di sini sumber daya alam menjadi faktor risiko. Selanjutnya, dinamika kekerasan dan ilegalitas yang banyak terjadi selama periode konflik ini tidak saja menimbulkan dampak ekologis, namun ternyata juga kian memperparah kondisi ketimpangan agraria dan kian mempertajam “ketidakpuasan politik” yang sudah ada. Hal ini terjadi seiring dengan pengusiran dan bahkan pembunuhan atas etnis pendatang, pengambilalihan tanah-tanah terlantar yang ditinggal mengungsi para pemiliknya, dan sebagainya. Mereka yang menjado korban kekerasan ini bukan hanya etnis Jawa dan Gayo yang menentang GAM, akan tetapi juga etnis Aceh yang merupakan pendatang di Dataran Tinggi Gayo dan yang kerap mendapatkan stigma sebagai pendukung GAM (lihat dua butir pertama pada **Gambar 15**).



Gambar 15 Pelajaran dari Aceh mengenai Peran Penting Faktor SDA

Namun, pengalaman penyelesaian konflik di Aceh juga menunjukkan bahwa sumber daya alam dapat berperan penting sebagai salah satu faktor peluang yang memungkinkan kesepakatan damai yang komprehensif dapat dihasilkan. Melalui lima kali putaran perundingan damai di Helsinki sejak Januari hingga Juli 2005, kedua belah pihak yang bertikai akhirnya menyepakati pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur peran sumber daya alam dalam penyelesaian akar konflik dan sekaligus pemantapan perdamaian, seperti proporsi bagi hasil kekayaan alam dari Aceh yang lebih adil, kewenangan besar pemerintah Aceh atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, distribusi tanah pertanian kepada gerilyawan GAM dan korban konflik, restitusi harta benda yang rusak atau musnah selama konflik, dana otonomi khusus untuk pemulihan dan pembangunan pasca-konflik, dan berbagai kesepakatan mendasar lainnya.

Sayangnya, setelah perdamaian tercapai, banyak janji yang termuat dalam perjanjian Helsinki tidak berhasil diwujudkan atau dipenuhi dengan cara-cara yang dianggap lebih mengistimewakan pihak tertentu. Hal terakhir ini terjadi karena selama proses transisi perdamaian, terjadi friksi yang sangat tajam di tubuh GAM sendiri. Di sisi lain, baik pihak GAM maupun pemerintah sama-sama mendesak

pendekatan sekuritisasi (menonjolkan pertimbangan keamanan dalam arti sempit) selama periode genting transisi perdamaian. Periode ini juga ditandai meluasnya fenomena korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan yang sangat merugikan bagi konsolidasi perdamaian secara keseluruhan. Pada saat yang sama, berbagai program perdamaian dan pembangunan pasca-konflik telah menjadi ajang berebut keuntungan (*profitable peace*) di antara segelintir elite dan para aktor konflik dari kubu berlawanan, sementara rakyat yang menjadi korban konflik sering kali tidak memperoleh manfaat yang signifikan dari program-program tersebut. Kesemuanya ini akhirnya memicu berbagai ketegangan di internal masyarakat Aceh yang bahkan telah melahirkan siklus baru konflik di Aceh, meskipun dengan intensitas rendah, di mana sumber daya alam turut menjadi salah satu faktor risiko yang berperan di baliknya.

6

PENUTUP

Uraian teoritis yang disajikan pada Bab 2 hingga Bab 4 maupun ilustrasi kasus Aceh yang dipaparkan pada Bab 5 menunjukkan betapa penting peran yang dapat dimainkan oleh faktor sumber daya alam, baik dalam arti negatif sebagai pemicu konflik maupun dalam arti positif sebagai landasan dan bahkan bagian dari proses perdamaian itu sendiri.

Menyadari hal ini, maka ada kebutuhan yang mendesak untuk bisa mengenali secara mendalam berbagai dimensi dan karakteristik dari sumber daya alam dan hubungan yang dapat berlangsung antara berbagai aspek sumber daya alam ini dengan dinamika konflik dan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjalankan inisiatif apa pun dalam rangka resolusi konflik maupun proses perdamaian, maka kompleksitas faktor sumber daya alam ini dapat diidentifikasi dan diperhitungkan terlebih dulu secara cermat dan mendalam. Melalui cara demikian, diharapkan setiap upaya resolusi konflik, konsolidasi perdamaian maupun pembangunan pasca-konflik dapat benar-benar sensitif pada kompleksitas berbagai aspek sumber daya alam ini sehingga peran negatifnya dapat dihindari dan berbagai perannya yang bersifat positif dapat dipastikan dan dioptimalkan.

Dalam konteks pembangunan secara umum, pemahaman atas kompleksitas berbagai aspek sumber daya alam ini juga dapat memberikan kewaspadaan untuk selalu sensitif terhadap potensi konflik yang dapat dipicu oleh faktor sumber daya alam. Dengan kewaspadaan demikian, maka konflik dapat dihindari sedini mungkin dari seluruh proses pembangunan yang dijalankan. Pada saat yang sama, peran positif sumber daya alam dalam proses pembangunan dapat dipastikan, yaitu agar dapat menjadi landasan bagi tumbuhnya sumber-sumber kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya dan sekaligus terpenuhinya berbagai aspek *human security* dalam arti yang sebenar-benarnya. []

Pengakuan

Tulisan ini pada awalnya adalah presentasi yang pernah penulis sampaikan pada diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) IPB pada 6 Februari 2020. Presentasi inilah yang kemudian dikembangkan menjadi tulisan ini, meskipun baru dalam bentuk survei singkat dan belum menjadi satu tinjauan yang bersifat kritis. Hal ini karena tujuan tulisan ini sekedar untuk menyajikan survei teoritis yang masih awal mengenai keterkaitan antara sumber daya alam, konflik dan perdamaian.

Sejalan dengan tujuan penulisan tersebut, maka disajikan pula bibliografi terpilih yang dipandang relevan dengan fokus pembahasan ini, seperti dicantumkan pada bagian berikut ini.

BIBLIOGRAFI TERPILIH

A. Sumber Daya Alam dan Agraria Sebagai Akar Konflik

- Renner, Michael (2002) "The Anatomy of Resource Wars." *Worldwatch Paper* 162.
- Humphreys, Macartan (2005) Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms." *The Journal of Conflict Resolution*, 49(4): 508-537.
- Cramer, Christopher & Paul Richards (2011) "Violence and War in Agrarian Perspective." *Journal of Agrarian Change*, 11(3): 277-297.
- Richards, Paul (2005) "To Fight or to Farm? Agrarian Dimensions of the Mano River Conflicts (Liberia and Sierra Leone)." *African Affairs*, 104(417): 571-590.

B. Kelangkaan Sumber Daya Alam Sebagai Pemicu Konflik

- Kaplan, Robert D. (2000) *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War*. New York: Random House.
- Homer-Dixon, Thomas (1999) *The Environment, Scarcity, and Violence*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Gleditsch, Nils Petter & Henrik Urdal (2002) "Ecoviolence? Links between Population Growth, Environmental Scarcity and Violent Conflict in Thomas Homer-Dixon's Work." *Journal of International Affairs*, 56(1): 283-302.
- Stalley, Phillip (2003) "Environmental Scarcity and International Conflict." *Conflict Management and Peace Science*, 20(1): 33-58.

C. Kelimpahan Sumber Daya Alam Sebagai Pemicu Konflik

- Billon, Philippe Le (2009) "Natural Resource Types and Conflict Termination Initiatives." *Colombia Internacional*, 70: 9-34.
- Roy, Vita (2018) "Natural Resource Production and the Risk of Conflict Recurrence." *Studies in Conflict & Terrorism*, 41(1): 227-234.
- Collier, Paul & Anke Hoeffler (2004) "Greed and Grievance in Civil War." *Oxford Economic Papers*, 56(4): 563-595.
- Ross, Michael L. (2004) "What Do We Know about Natural Resources and Civil War?" *Journal of Peace Research*, 41(3): 337-356.

D. Dinamika Konflik dan Dampaknya pada Sumber daya Alam dan Struktur Agraria

- Delgado-Matas, Cristobal, Blas Mola-Yudego, David Gritten, David Kiala-Kalusing, Timo Pukkala (2015) "Land Use Evolution and Management under Recurrent

Conflict Conditions: Umbundu Agroforestry System in the Angolan Highlands.” *Land Use Policy*, 42: 460-470.

Gómez, Carlos J. L., Luis Sánchez-Ayala & Gonzalo A. Vargas (2015) “Armed Conflict, Land Grabs and Primitive Accumulation in Colombia: Micro Processes, Macro Trends and the Puzzles in Between.” *The Journal of Peasant Studies*, 42(2): 255-274.

(UNEP) United Nations Environment Programme (2009) *Integrating Environment in Post-Conflict Needs Assessments*. Nairobi: UNEP.

Jensen, David & Steve Lonergan (2012) *Assessing and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding*. New York: Earthscan.

E. Peran Sumber Daya Alam dalam Proses Perdamaian dan Pembangunan Pasca-Konflik

Borras Jr, Saturnino M. & Jennifer C. Franco (2011) “Land, Conflict and the Challenge of Pro-poor Peace-building: Critical issues for Discussion.” *FriEnt Essay Series 07*.

Beevers, Michael D. (2019) *Peacebuilding and Natural Resource Governance After Armed Conflict*. Switzerland: Palgrave Macmillan.

(UNEP) United Nations Environment Programme (2009) *Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential*. Nairobi: UNEP.

Young, Helen & Lisa Goldman (2015) *Livelihoods, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding*. New York: Earthscan.

F. Sumber Daya Alam dan Agraria dalam Dinamika Konflik dan Perdamaian di Aceh

Shohibuddin, Mohamad (2018) *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, khususnya Bagian IV: Konflik dan Perdamaian di Aceh dari Perspektif Agraria. Yogyakarta: STPN Press.

Ross, Michael L. (2005) “Resources and Rebellion in Aceh, Indonesia.” Chapter 2 in Paul Collier and Nicholas Sambanis, eds. *Understanding Civil War: Evidence and Analysis. Volume 2: Europe, Central Asia, and Other Regions*. Washington DC: The World Bank.

Aspinall, Edward (2007) “The Construction of Grievance Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict.” *Journal of Conflict Resolution*, 51(6): 950-972.

Prasetyo, Stanley Adi & George Junus Aditjondro (2011) “Profitable Peace.” Chapter 4 in Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, eds. *Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Yogyakarta: PCD Press.

Lund, Christian (2018) “Predatory Peace: Dispossession at Aceh’s Oil Palm Frontier.” *The Journal of Peasant Studies*, 45(2): 431-452.

Dalam studi konflik dan perdamaian, faktor Sumber Daya Alam (SDA) selalu mendapatkan penekanan tersendiri karena peran pentingnya yang bersifat mendua. Ia merupakan *faktor risiko* yang dapat memicu konflik dengan kekerasan (*violent conflict*). Di sisi lain, ia juga merupakan *faktor peluang* yang dapat memungkinkan dan mendukung proses perdamaian. Selain itu, faktor SDA juga menjadi perhatian khusus dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang sensitif konflik dan menjamin *human security*.

Dalam tulisan ini berbagai peran faktor SDA di atas akan didiskusikan. Hal ini dilakukan melalui survei teoritis singkat atas karakteristik faktor SDA ini dan peran yang dimainkannya dalam dinamika konflik dan perdamaian di berbagai negara. Berdasarkan survei tersebut, tulisan ini lantas menyajikan ilustrasi penerapannya untuk menganalisis peran SDA dalam berbagai siklus konflik dan perdamaian yang terjadi berulang kali di Aceh, Indonesia.